

---

---

## Analisis Realisme Neoklasik Terhadap Keputusan Mesir Menghentikan Pasokan Gas Alam ke Israel Tahun 2012

Yolansya Lisya Gibrilya Riry<sup>1)</sup>, Adi Putra Suwecawangsa<sup>2)</sup>, Anak Agung Ayu Intan Prameswari<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana.

---

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji keputusan Mesir menghentikan pasokan gas alam ke Israel pada tahun 2012 melalui analisis faktor sistemik dan domestik. Reaksi Mesir terhadap Israel pasca kelengseran diktator Mubarak tampak kontradiktif dengan komitmen yang telah dibina melalui rangkaian perjanjian perdamaian tahun 1978-1979 silam. Terlepas dari kecaman dan risiko pemotongan bantuan luar negeri, Mesir tetap melanjutkan pembatalan kontrak ini. Perspektif Realisme Neoklasik digunakan oleh peneliti untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong keputusan Mesir menghentikan pasokan gas alam ke Israel dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tekanan-tekanan yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan Mediterania Timur, serta politik domestiknya sendiri telah mengantar Mesir pada keputusan tersebut. Dengan demikian, interaksi antara politik luar negeri dan dalam negeri memiliki andil dalam kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel.

**Kata-kunci** : Israel, Mesir, pasokan gas alam, Realisme Neoklasik

---

### Abstract

*This research examines Egypt's decision to stop supplying natural gas to Israel in 2012 through an analysis of systemic and domestic factors. Egypt's reaction to Israel after the fall of dictator Mubarak seems contradictory to the commitments that have been fostered through the series of peace agreements back to 1978 and 1979. Despite the criticism and the risk of foreign aid cuts, Egypt continued to cancel Israeli gas contract. Neoclassical Realism approach is used by the researcher to analyze the factors that drove Egypt's decision to stop the natural gas supply to Israel using qualitative method. This research identifies that the pressures which occurred in the Middle East and Eastern Mediterranean region, as well as its own domestic politics had led Egypt to this decision. Therefore, the interaction between both foreign and domestic politics has significantly influenced Egypt's foreign policy towards Israel.*

**Keywords** : Egypt, Israel, natural gas supply, Neoclassical Realism

---

### Kontak Penulis

Yolansya Lisya Gibrilya Riry

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Bali, Indonesia

Telp: +6285156106261

E-mail : yolansyalisya@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Dalam sistem internasional, negara-negara berinteraksi melalui kebijakan luar negeri untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya yang dilakukan melalui kerja sama. Kerja sama internasional didefinisikan sebagai keadaan saat negara melakukan penyesuaian perilaku dengan negara lain melalui proses koordinasi kebijakan yang menghasilkan suatu kesepakatan (Milner, 1992, p. 467). Pada bidang energi, kerja sama dilakukan untuk mencapai kepentingan ekonomi dan keamanan dalam alokasi sumber daya global.

Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) merupakan kawasan kunci dalam pasar minyak dan gas dunia, khususnya di sub-kawasan Mediterania Timur yang berfokus pada sumber energi gas alam. Mesir, salah satu negara produsen gas alam di Mediterania Timur, merupakan produsen gas alam terbesar di Afrika. Negara tersebut juga turut aktif menjadi pemain dalam kerja sama energi dengan melakukan ekspor gas ke beberapa negara di sekitarnya, termasuk Israel.

Kesepakatan energi disepakati antara Mesir dan Israel pada 1 Juli 2005 yang berisi tentang suplai gas alam dari Mesir ke Israel selama 15 tahun dan ekstensi periode 5 tahun sebesar 1,7 bcm per tahun (New York Times, 2005). Kesepakatan itu merupakan bagian dari upaya variasi pasar ekspor energi Mesir dan bentuk komitmen terhadap Perjanjian Perdamaian 1979. Suplai gas alam dimulai pada 1 Mei 2008, namun pada 22 April 2012, Mesir mengakhiri kesepakatan gas alam dengan Israel yang kemudian menambah tekanan pada hubungan kedua negara. Israel pun menilai Mesir telah melanggar Perjanjian Perdamaian 1979. Penghentian suplai gas alam ke Israel secara tiba-tiba ini diprediksi akan berpotensi pada konflik apabila dilanjutkan.

Penghentian pasokan gas alam ini dinilai dapat mengantar Mesir pada risiko berupa

pemotongan bantuan luar negeri Amerika Serikat dalam bidang militer dan ekonomi yang telah disepakati bersamaan dengan Perjanjian Damai 1979. Kontribusi bantuan militer AS kepada Mesir diketahui mencapai sepertiga dari keseluruhan anggaran pertahanan Mesir setiap tahunnya (Gienger, 2011). Adanya kebijakan secara unilateral tersebut dapat meningkatkan tensi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel-AS, sebagaimana Mesir merupakan mitra yang menjembatani kepentingan AS di Timur Tengah dengan negara-negara Arab. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendorong Mesir untuk menghentikan pasokan gas alam ke Israel pada tahun 2012, mengingat kesepakatan untuk berdamai sudah ada sejak lama dan diwujudkan, namun upaya untuk menormalisasi hubungan jangka panjang antara kedua negara pada khususnya dan hubungan antara negara-negara Arab dan Israel pada umumnya belum kunjung terimplementasikan dengan baik.

Untuk membantu peneliti melihat fenomena ini, peneliti menggunakan dua literatur sebagai pedoman. Literatur pertama yang digunakan oleh peneliti adalah tulisan yang berjudul *China's Puzzling Energy Diplomacy toward Iran* oleh Fuzuo Wu. Wu (2015) membahas mengenai dilema yang dialami oleh Tiongkok untuk terus memperkuat hubungannya dengan Iran dalam pemenuhan kebutuhan minyak bumi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepentingan nasional, di mana ia kemudian menilai bahwa Tiongkok memprioritaskan hubungan dengan AS untuk pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi, serta terhindar dari isolasi dan sanksi. Penelitian ini membantu peneliti untuk melihat perubahan sikap Tiongkok yang menghentikan kerja sama energi secara sepihak adalah untuk memenuhi kepentingan nasional, namun Wu tidak dapat menjelaskan faktor internal

Tiongkok sendiri dan faktor sistemik lainnya. Dengan demikian, literatur kedua diperlukan untuk membantu penelitian ini.

Literatur kedua yang digunakan berikutnya adalah tulisan oleh Jon B. Alterman dengan judul *Dynamics Without Drama: New Options and Old Compromises in Egypt's Foreign Policy*. Alterman (2005) memberi perhatian pada perubahan orientasi kebijakan luar negeri Mesir. Dengan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri secara umum, Alterman mendapatkan bahwa Mesir cenderung kurang konsisten dalam merumuskan kebijakan luar negeri karena adanya *balancing* antara ancaman eksternal dan kebutuhan domestik yang dilakukan oleh Mesir. Penelitian Alterman membantu peneliti untuk menggunakan analisis salah satu teori dalam analisis kebijakan luar negeri, namun tulisan Alterman ini tidak menyinggung kebijakan tertentu secara spesifik. Alterman juga tidak menjelaskan secara rinci konflik internal Mesir. Oleh sebab itu, penelitian ini menjabarkan lebih spesifik faktor eksternal dan domestik dalam kebijakan luar negeri Mesir dengan studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu penghentian pasokan gas Mesir ke Israel pada tahun 2012.

Realisme Neoklasik digunakan sebagai acuan teori dalam menganalisis faktor-faktor pembatalan kontrak gas alam oleh Mesir. Teori Realisme Neoklasik dibangun di atas dasar dari dua pendekatan teoritis, yaitu Realisme Klasik dan Neorealisme dengan mengintegrasikan interaksi antara variabel tingkat unit dan sistem. Fokus dari Realisme Neoklasik adalah interaksi dari dinamika internal dan sistem internasional (Rose, 1998, p. 146). Sebagaimana halnya pendekatan Realisme secara umum, negara merupakan aktor utama dalam perspektif Realisme Neoklasik, tanpa mengesampingkan peran dari pembuat kebijakan dan elit politik sebagai aktor yang relevan (Lobell, 2009, p. 56). Selain itu, sejalan

dengan Neorealisme oleh Waltz, pandangan Realisme Neoklasik sejatinya menganggap bahwa perilaku internasional negara didorong oleh distribusi kekuatan relatif dalam sistem internasional yang anarkis (Rose, 1998, p. 150), namun anarki bukan kekuatan kausal independen (*independent causal force*) seperti yang diasumsikan oleh para neorealis, melainkan suatu kondisi permisif seperti yang diasumsikan oleh realis klasik.

Di samping variabel independen yang berupa distribusi kekuatan relatif, Realisme Neoklasik kemudian didesain dengan menambahkan variabel intervensi di tingkat unit. Faktor-faktor yang menjadi komponen domestik yang dimaksud, antara lain hubungan negara dan masyarakat, institusi domestik, budaya strategis, serta citra pemimpin, di mana serangkaian faktor tersebut mempengaruhi proses dalam tingkat domestik – persepsi elit politik, pengambilan keputusan, dan mobilisasi sumber daya (Lobell, 2009, pp. 58-74).

Dalam kasus ini, faktor yang berperan sebagai variabel independen dalam pemutusan pasokan gas alam adalah tekanan pada tingkat sistem di kawasan Timur Tengah dan Mediterania Timur, yakni posisi Mesir di kawasan sebagai negara Arab sekaligus salah satu penghasil sumber gas alam terbesar di kawasan. Kebijakan luar negeri tetap berfokus pada faktor sistemik negara dan power-nya sebagai variabel yang berdiri sendiri, dengan adanya intervensi dari determinan domestik. Dalam kasus ini, politik domestik Mesir berperan sebagai variabel intervensi. Interaksi dua tingkat antara tingkat sistem dan unit ini menjadikan Realisme Neoklasik teori dengan analisis *multi-level* yang dapat menjelaskan fenomena perubahan arah kebijakan suatu negara, seperti yang dilakukan oleh Mesir terhadap Israel.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Sumber

data dalam penelitian ini tergolong dalam sumber data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung dari analisis media perantara. Negara merupakan unit analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, di mana Mesir menjadi fokus yang diteliti menggunakan teori Realisme Neoklasik. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur dari berbagai macam sumber cetak maupun digital. Analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan dengan menggunakan tiga tahap analisis yang dikemukakan oleh Miles et al (2014). Pertama, *data condensation* atau pemfokusan dan penyederhanaan data. Selanjutnya, *data display* atau pengelompokkan dan penyatuan informasi yang berkesinambungan menggunakan pisau analisis Realisme Neoklasik. Terakhir, *conclusion drawing and verification* atau penafsiran data dan peninjauan kembali. Setelah itu, data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Hubungan Mesir dan Israel (1970-2011)

Hubungan Mesir dan Israel terbilang sangat kompleks dan dinamis. Di bawah pemerintahan Anwar Sadat (1970-1981), orientasi politik luar negeri Mesir, antara lain: 1) Memulihkan wilayah pendudukan yang tersisa di Mesir; 2) Mengakhiri keadaan perang dengan Israel sebagaimana konflik; 3) Memperbaiki hubungan Mesir dengan Amerika Serikat; dan 4) Modernisasi ekonomi Mesir dengan menarik investasi asing dan teknologi Barat (Dessouki dalam Shama, 2008, p. 55). Pada masa Sadat memerintah, ia menginisiasi Perang Yom Kippur yang kemudian menjadi katalisator rangkaian perjanjian perdamaian dengan Israel. Mesir dengan pendekatan *go-it-alone* tanpa berkoordinasi dengan negara-negara Arab mengiring Mesir pada *Camp David Accords* 1978

dan Perjanjian Damai 1979 menunjukkan normalisasi hubungan Arab-Israel oleh Sadat yang menuntut komitmen untuk membangun hubungan ekonomi melalui penjualan sumber daya energi dari Mesir ke Israel. Berbagai kebijakan normalisasi hubungan bilateral oleh Sadat merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi Mesir dan menjadi pelopor kesepakatan suplai gas dari Mesir ke Israel yang merupakan implementasi komitmen perjanjian perdamaian 1978-1979 dengan pergantian sumber daya dari minyak ke gas alam.

Pasca usainya pemerintahan Sadat, Mubarak mengambil alih kepemimpinan sejak tahun 1981 hingga 2011. Kebijakan luar negeri Mubarak secara umum berorientasi pada perdamaian dengan Israel dan AS tanpa melakukan tindakan yang merugikan Mesir di kawasan. Di bawah pemerintahan Mubarak, Mesir mendekati diri kembali dengan negara-negara Arab lainnya. Akibatnya, hubungan bilateral antara Mesir dan Israel kerap menimbulkan perselisihan dan dilema dalam periode kepemimpinan Mubarak. Terkait isu Palestina, Mubarak cenderung bermain 'aman', seperti mewakili hak Palestina pada setiap pertemuan antar-negara. Meskipun demikian, Mubarak masih kokoh dengan pendirian sebagai pendukung dari *Palestinian Authority* (PA) dalam isu konflik Israel-Palestina dan mengucilkan Hamas (Sharp, 2009, p. 16). Dalam konteks hubungannya dengan Israel, Mubarak cenderung berhati-hati dan tidak membuat manuver besar dalam kebijakan luar negeri (Shama, 2008, p. 64). Salah satu kerja sama perdagangan yang dilakukannya dengan Israel adalah kesepakatan gas alam pada tahun 2005 sebagai bentuk komitmen terhadap kerja sama bidang energi dalam Perjanjian Damai 1979 silam.

### Perjanjian Gas Alam Mesir-Israel (2005-2012)

Jauh sebelum perjanjian gas alam yang disepakati pada tahun 2005, Mesir dan Israel

sudah berkomitmen untuk bekerja sama dalam bidang energi sejak tahun 1979 yang tertulis dalam Perjanjian Perdamaian Mesir-Israel 1979 (Reis, 2014, p. 7). Dalam Perjanjian Perdamaian 1979, Mesir berkomitmen untuk memasok minyak kepada Israel secara teratur. Akan tetapi, ekspor minyak ke Israel harus diakhiri karena produksi minyak Mesir mengalami penurunan sehingga Mesir beralih ke produksi gas alam. Ekspor gas alam kemudian masuk ke dalam kebijakan dagang Mesir. Pemerintah Mesir pun aktif melakukan pendekatan dengan negara lain dalam pasar ekspor gas alam, di mana Mesir kemudian melihat Israel sebagai target pasar potensial ekspor.

Pada tanggal 1 Juli 2005, Mesir yang diwakili oleh Menteri Perminyakan, Sameh Fahmy, dan Israel yang diwakili oleh Menteri Infrastruktur Nasional, Benjamin Ben-Eliezer menandatangani perjanjian suplai gas alam (Reis, 2014, p. 8). Sebelum menandatangani perjanjian bersama pemerintah Mesir, Ben-Eliezer telah menemui Mubarak selaku presiden Mesir untuk berdiskusi mengenai kesepakatan gas alam ini. Perjanjian yang senilai USD2,5 miliar ini berisi kesepakatan bahwa Mesir bersedia untuk memasok gas alam ke Israel sebesar 1,7 miliar meter kubik (bcm) per tahun dan masa kontrak selama 15 tahun, dengan 5 tahun tambahan untuk ekstensi kontrak (*New York Times*, 2005). Israel menyambut baik dan menilai perjanjian ini sebagai bentuk komitmen nyata terhadap *Camp David*.

Realisasi perjanjian gas alam ini mulai dilakukan pada tahun 2008 yang disuplai melalui saluran pipa gas *Eastern Mediterranean Gas and Oil* (EMG) yang terhubung dalam *Arab Gas Pipeline* (AGP) dari Al-Arish, Mesir, ke Ashkelon, Israel. Terhitung sejak tahun 2010, Israel menjadi bergantung pada suplai gas alam Mesir hingga 40 persen dari konsumsi gas alamnya (Shaffer, 2013, p. 121). Pada tahun 2012, tepatnya tanggal 22 April, perjanjian gas

alam dengan Israel diakhiri secara sepihak oleh Mesir melalui informasi dari perusahaan gas milik negara, yaitu *Egyptian Natural Gas Holding Company* (EGAS). Menanggapi pembatalan secara sepihak tersebut, Israel menganggap langkah yang diambil oleh Mesir sebagai bentuk pelanggaran terhadap komitmen *Camp David*.

### Revolusi Mesir Tahun 2011

Tepat pada 25 Januari 2011, rakyat Mesir melakukan aksi demonstrasi secara masif di Kairo dan berbagai kota besar di Mesir untuk menggulingkan rezim otoriter Hosni Mubarak yang telah menjabat sebagai presiden selama hampir 30 tahun (Aljazeera, 2020). Revolusi Mesir tahun 2011 ini merupakan salah satu dari rangkaian aksi revolusioner yang dikenal dengan istilah '*Arab Spring*' atau '*Arab Uprisings*'. Gelombang protes rakyat terhadap pemerintahan Mubarak terjadi selama 18 hari. Pada 31 Januari, Mubarak yang masih memimpin merombak kabinetnya. Protes publik masih dilakukan dan meluas ke beberapa kota besar di Mesir hingga pada 2 dan 3 Februari, masyarakat pro-demokrasi dan oposisi Mubarak saling menyerang. Isu Israel-Palestina menjadi salah satu bahan protes rakyat Mesir. Setelah dua hari penuh kekerasan dan ketidakpastian, negosiasi pun dilakukan antara pihak pemerintah dan oposisi. Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) sebagai pihak oposisi sepakat untuk menemui Wakil Presiden, Omar Suleiman, untuk mendiskusikan transisi demokrasi (Sharp, 2011, p. 9). Desakan rakyat Mesir selama 18 hari berturut-turut yang menuntut agar Mubarak turun dari jabatan kepresidenannya membuahkan hasil. Pada 11 Februari 2011 melalui pernyataan Wakil Presiden Suleiman, Mubarak memutuskan untuk mengundurkan diri setelah 29 tahun 120 hari menjabat sebagai pemimpin negara dan menyerahkan pemerintahan pada militer (Aljazeera, 2020).

## Pemerintahan Interim SCAF pada Masa Transisi (2011-2012)

Militer di Mesir berhasil mendapatkan kredibilitas dan dukungan publik sebagai pihak yang melindungi negara dari kekacauan, mengingat momentum yang didapatkan militer sangat tepat saat Revolusi Mesir terlebih lagi militer mengambil alih kepemimpinan pasca lengsernya Mubarak. Otoritas tinggi di Mesir mengalami peralihan dari Mubarak ke militer, dalam hal ini *Supreme Council of the Armed Forces* (SCAF), yang dipimpin oleh Mohammed Hussein Tantawi. SCAF memerintah Mesir dalam masa transisi hingga pemilihan umum diadakan dan presiden baru terpilih secara demokratis. Beragam kebijakan dirancang agar Mesir siap dalam memulai transisi demokrasi, seperti Deklarasi Konstitusional I dan II yang mengatur pembubaran parlemen dan pemilihan umum.

Peradilan juga diselenggarakan oleh SCAF bagi pelaku-pelaku kriminal saat revolusi 18 hari, termasuk Mubarak yang didakwa atas penyalahgunaan jabatan publik dan perintah untuk pembunuhan pengunjuk rasa selama demonstrasi. Pemerintahan sementara SCAF tidak terlalu berjalan dengan mulus. Beberapa rangkaian demonstrasi dan protes dilayangkan kepada pemerintahan SCAF karena dugaan tarik ulur yang dilakukan, seperti menunda pemilu (BBC, 2012). Berbagai kekisruhan, terutama dengan Israel, juga mewarnai masa pemerintahan SCAF, termasuk diantaranya pembatalan kesepakatan gas alam pada April 2012 silam.

## Analisis Konteks Sistemik atas Keputusan Mesir Menghentikan Pasokan Gas Alam

### Legitimasi Regional dalam Arabisme terkait Isu Palestina

Realisme Neoklasik dimulai dengan asumsi dasar yang senada dengan Neorealisme bahwa sistem internasional membentuk dan membatasi pilihan-pilihan kebijakan negara

(Taliaferro et al., 2009, p. 19). Asumsi tersebut relevan dengan dinamika hubungan antar-negara di kawasan Timur Tengah sebagai subsistem internasional. Pergolakan-pergolakan yang terjadi di kawasan tersebut membatasi Mesir sebagai negara independen untuk merancang kebijakan, sebagaimana Mesir juga merupakan bagian dari suatu sistem. Korany dan Dessouki (2008, p. 4) menguraikan tiga faktor penentu utama dorongan orientasi Arab. Pertama, negara-negara Arab dapat memberikan pengaruh lebih besar melalui pendekatan regional terhadap kebijakan luar negerinya. Kedua, konflik Arab-Israel dianggap sebagai masalah umum negara-negara Arab. Ketiga, sistem kepercayaan yang sama dalam konteks politik yang tergambar dalam Arabisme dan konteks religius melalui Islam.

Identitas Mesir telah dibentuk oleh atribut khas kawasan yang dibalut dalam nasionalisme Arab, yakni Arabisme politis (*political Arabism*). Ikatan kepentingan Arab ditunjukkan dengan jelas dalam kebijakan luar negeri Mesir, salah satunya dalam isu Palestina yang menjadi pendorong orientasi regional negara-negara Arab. Pecahnya Perang Gaza pada akhir tahun 2008 hingga 2009 menguji Arabisme negara-negara Arab yang memicu adanya reorientasi kebijakan luar negeri Mesir di kawasan. Kampanye militer yang diluncurkan Israel bertajuk '*Operation Cast Lead*' pada 27 Desember 2008 melawan Hamas di Jalur Gaza terjadi sebagai respon balasan atas ancaman keamanan bagi penduduk Israel bagian selatan yang menerima serangan dari Gaza (Zanotti et al., 2009, p. 7). Ketegangan meningkat menjadi perang terbuka dan berdarah yang terjadi selama tiga minggu lamanya. Perang ini memicu seruan internasional dan regional untuk mengakhiri kekerasan.

Mesir memanfaatkan momentum ini untuk membalikkan keadaan dengan membuat kehadirannya lebih terasa di kawasan. Menu

Mesir mengundang Menlu Israel untuk datang ke Kairo dalam upaya menghentikan operasi militer Israel di Gaza (Umar, 2013, p. 57). Bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan 30 unit ambulans untuk mengangkut korban terluka juga dikirimkan oleh Kementerian Kesehatan dan Populasi Mesir agar korban-korban bisa mendapatkan perawatan intensif di Sinai Utara (Wafa, 2008). Namun di sisi lain, Mesir tidak mengindahkan panggilan untuk hadir di KTT Darurat Arab untuk membicarakan perang ini. Selain itu, Mesir juga menolak untuk membuka perbatasan Rafah antara Sinai dan Gaza sebagaimana yang didesak oleh negara-negara Arab dan negara non-Arab di Kawasan agar bantuan bisa diberikan dengan cepat dan warga Palestina dapat mengungsi sementara waktu dengan alasan keamanan (Black dalam *The Guardian*, 2009). Upaya yang ditunjukkan Mesir pada persoalan perang Gaza ini merupakan bentuk dari *balancing* yang dilakukan untuk mendukung Arabisme di satu sisi namun tetap tidak bermusuhan dengan Israel di sisi lain. Setelah Mubarak turun dari jabatannya, harapan-harapan untuk menghidupkan Arabisme Mesir mulai muncul ke permukaan. Pergeseran dari kepentingan nasional Mesir ke kepentingan nasional Arab dan keamanan kolektif mulai dihidupkan kembali di masa pemerintahan transisi militer dengan pengakuan akan legalitas Ikhwanul Muslimin. Pemerintah interim militer SCAF berhasil memanfaatkan Arabisme untuk membuktikan bahwa kebijakan luar negeri dapat digunakan sebagai sumber utama legitimasi rezim dalam mempersiapkan kepemimpinan Ikhwanul Muslimin. Kebijakan yang diambil Mesir untuk menghentikan pasokan gas alam ke Israel pada tahun 2012 dinilai strategis untuk mengembalikan legitimasi Mesir di mata negara-negara Arab. Dengan dihentikannya suplai gas alam ke Israel, komitmen terhadap perjanjian damai dikorbankan. Hal itu

dilakukan untuk menegaskan integritasnya terhadap Arabisme yang diyakini.

### Ancaman Status Israel sebagai *Gas-Hub* di Mediterania Timur

Pandangan Realisme Neoklasik memiliki asumsi bahwa ambisi dari suatu negara untuk mencari pengaruh melalui kebijakan luar negerinya ditentukan oleh kekuatan relatif negara tersebut (Rose, 1998, p. 152). Ambisi dari suatu negara untuk mencapai kepentingannya di tingkat sistem didorong juga oleh ancaman akan ambisi negara lain. Hal ini terjadi oleh karena adanya ketidakpastian yang merupakan inti dari konsepsi anarki dalam Realisme Neoklasik (Taliaferro et al., 2009, p. 29). Fenomena ini juga terjadi pada Mesir di Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Kawasan MENA adalah pusat persaingan internasional dalam bidang energi. Ketersediaan gas alam di MENA pada tahun 2011 mencapai 24 persen atau sebesar 8 triliun meter kubik (tcm) dari total cadangan gas alam dunia sebesar 208 tcm (Khatib, 2014, p. 72). Terlebih khusus dengan adanya penemuan masif *reservoir* di sub-kawasan Mediterania Timur seperti tampak pada Tabel 1. Estimasi data yang dikeluarkan oleh *The U.S. Geological Survey* dilansir oleh Forbes (2020) memperkirakan ada sekitar 122 triliun kaki kubik (tcf) gas terletak di sana.

**Tabel 1.** Penemuan Besar Gas Alam di Laut Mediterania Timur tahun 2009-2012

Field Name	Year of Discovery	Country	Estimated Reserves (bcm)
Tamar	2009	Israel	283
Leviathan	2010	Israel	510
Aphrodite	2011	Cyprus	200
Tannin	2012	Israel	34

Sumber: Prontera & Ruszel (2017)

Semua negara di Mediterania Timur adalah pengimpor gas, dengan pengecualian Mesir

sebagai eksportir gas alam regional. Sejak berbagai penemuan cadangan gas alam terjadi pada masa pemerintahan Mubarak, Mesir bergantung pada sumber energi gas untuk kebutuhan listriknya. Diketahui permintaan domestik terhadap kebutuhan gas alam pun meningkat hampir 57 persen pada tahun 2005 (Ratner et al., 2013, p. 25). Meningkatnya permintaan domestik pada tahun 2005 tersebut pun tetap tidak menghalangi Mesir untuk meneruskan kesepakatan ekspor suplai gas ke Israel. Produksi gas alam Mesir tidak mengalami kenaikan pasca gas alam dialirkan ke Israel pada tahun 2008. Selain itu, status sebagai *gas-hub* di kawasan telah menjadi prioritas nasional Mesir. Mesir merupakan satu-satunya di antara negara-negara lain di kawasan yang telah memiliki infrastruktur produksi dan ekspor gas alam yang memadai melalui saluran pipa gas maupun *liquified natural gas* (LNG). Dengan total panjang jaringan transmisi 7.485 km dan jaringan distribusi 38.000 km, Mesir memiliki infrastruktur gas terbesar di kawasan Mediterania Timur (LYNX, 2019, p. 6). Mesir memelopori proyek kerja sama energi paling ambisiusnya, yaitu *Arab Gas Network* melalui pipa AGP. Hal-hal tersebut menyokong ambisi Mesir untuk melakukan ekspansi pasar. Sayangnya, Mesir kian menghadapi ancaman kelangkaan gas alam akibat kebijakan subsidi ekstensif yang berdampak pada naiknya permintaan dalam negeri (Ratner, 2016, p. 7). Pemerintah Mesir pun harus melakukan reorientasi kebijakan ekspor gas, salah satunya dengan menghentikan pasokan gas ke Israel. Dengan ditemukannya ladang-ladang cadangan gas baru seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, Israel tidak hanya dapat menutupi kebutuhannya sendiri, tetapi juga menjadi pengespor gas alam. Israel yang awalnya mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan energinya dapat membalikkan keadaan dengan menjadi *net*

*exporter* di kawasan. Hal itu tentunya mengancam posisi Mesir yang sudah bertahun-tahun lamanya menjadi *gas-hub* kawasan, mengingat kedua negara juga kerap berselisih. Mesir merespon insentif sistemik melalui pertimbangan-pertimbangan yang ada untuk menguatkan posisinya dalam sistem. Fokus utama dari strategi gas Mesir adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan energi domestik negara terpenuhi. Dengan diputuskannya pasokan gas alam ke Israel yang memang sudah menjadi isu sensitif bagi publik dalam negeri, Mesir dapat menggunakan cadangan gas alam kebutuhan domestik. Dengan demikian, Mesir dapat mengakhiri kebijakan subsidi dan meningkatkan suplai di pasar domestik karena adanya pengurangan ekspor. Selain itu, pemutusan ekspor gas alam ini akan memicu adanya ketergantungan dari Israel pada Mesir karena Israel belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk memproduksi atau bahkan mengekspor gas ke negara lain. Mesir merupakan negara terdekatnya dengan infrastruktur gas alam terlengkap. Ketergantungan inilah yang akan memberi *bargaining power* pada Mesir dalam sektor gas, khususnya untuk *grand strategy* Mesir menjadi *gas-hub* di kawasan. Dengan demikian, rasional bagi Mesir untuk meneruskan keputusan penghentian suplai tersebut.

### **Analisis Konteks Domestik atas Keputusan Mesir Menghentikan Pasokan Gas Alam**

#### **Persepsi Militer Mesir Terhadap Israel dan AS**

Persepsi dan citra elit politik menggambarkan keyakinan dari individu yang duduk di pemerintahan untuk mengambil keputusan. Asumsi Realisme Neoklasik untuk persepsi dan citra elit politik ini adalah bahwa *decision-makers* merespon secara subjektif melalui persepsi mereka tentang fenomena, yang mungkin tidak seakurat realita (Korany, 1984,

p. 13). Persepsi SCAF sebagai pemerintah interim pada masa transisi ini kemudian penting untuk dianalisis.

Militer memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan politik Mesir. Saat demonstrasi revolusi dilakukan oleh rakyat Mesir untuk menjatuhkan Mubarak, ia melakukan perombakan kabinet yang diisi oleh perwira tinggi militer. Faktanya, Mubarak menyerahkan kekuasaan pada SCAF pasca revolusi tahun 2011. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga militer tetap berkuasa dan memiliki pengaruh dalam politik Mesir di pemerintahan.

Militer pasca-Mubarak secara umum dipandang baik dibanding institusi-institusi lainnya. Sebesar 88 persen publik berpendapat bahwa militer membawa pengaruh yang baik dalam hal-hal yang terjadi di Mesir. Secara spesifik, *Pew Research* (2011) juga membuktikan publik menilai Tantawi sebagai Kepala SCAF dengan baik sebesar 90 persen. Walaupun demikian, SCAF kemudian mendapat banyak protes publik di masa kepemimpinan Tantawi. Tuntutan dari rakyat menekankan perlunya pertanggungjawaban pejabat militer atas pelanggaran hak asasi manusia serius yang dilakukan selama revolusi dan pasca-revolusi serta hubungan dengan Israel yang banyak ditentang rakyat (Sharp, 2012, p. 11-12). Citra militer di mata publik pun berubah, bahkan rakyat Mesir berpendapat bahwa mengakhiri kekuasaan militer adalah prioritas pertama mereka.

Tak hanya publik Mesir, Gedung Putih juga mengeluarkan pernyataan yang meminta SCAF untuk segera menyerahkan semua kekuasaan kepada pemerintah sipil baru (*The Guardian*, 2011). SCAF merasa tersinggung akan permintaan itu dan merasa AS telah berpihak dengan kelompok provokator yang menghasut publik untuk memperusuh negara. AS beserta Israel dinilai berkonspirasi melawan Mesir untuk mengubahnya menjadi *failed state* seperti

Irak agar Israel dapat mendominasi kawasan (*International Crisis Group*, 2012, p. 12). Sejak perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel ditandatangani, tentara Mesir secara rutin menerima bantuan militer dari AS sebesar USD1,3 miliar beserta pelatihan militer. Alhasil, pejabat tinggi militer Mesir telah memiliki hubungan baik dengan perwira militer AS.

AS telah menunjukkan pendiriannya melalui sikap terhadap SCAF yang mengutuk kekerasan pada rakyatnya di mana UU Federal AS sendiri melarang bantuan apapun dialokasikan kepada pemerintah negara yang kepala pemerintahannya digulingkan melalui kudeta militer, kecuali pemerintah militer dapat segera menyerahkan posisinya kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis (*U.S. Congress*, Sec. 508). Dengan demikian, pilihan rasional yang dapat diambil oleh Tantawi adalah dengan mengadakan pemilu untuk mengamankan aliran bantuan luar negeri AS. Namun kenyataannya, SCAF justru menunda pemilu sehingga memunculkan amarah rakyat. SCAF kemudian memandang pemutusan pasokan gas sebagai aksi berani untuk merayu rakyat Mesir dan ancaman balik bagi eksistensi perjanjian damai.

Presiden *de facto* Mesir dari SCAF, Tantawi, juga dinilai sebagai satu hambatan utama AS untuk mengubah hubungan keamanannya dengan Mesir (*Tahrir Institute for Middle East Policy*, n.d.). Tantawi berpartisipasi dalam berbagai perang melawan Israel seperti dalam Krisis Suez tahun 1956, Perang Enam Hari tahun 1967, dan Perang Yom Kippur tahun 1973 yang menyebabkan krisis finansial AS (*Aljazeera*, 2021). Persepsi Tantawi ini bukan tidak beralasan. Meskipun Mesir merupakan salah satu negara di kawasan dengan kekuatan militer terbesar, tetapi Mesir juga merasa terancam akan kekuatan militer Israel karena kepemilikan nuklir. Dengan demikian, persepsi-persepsi terhadap Israel dan AS yang telah dijabarkan mengintervensi proses

pengambilan keputusan SCAF untuk menghentikan suplai gas alam secara sepihak.

### **'Cold Peace' sebagai Budaya Strategis Mesir terhadap Israel**

Budaya strategis diartikan secara umum sebagai sistem simbol yang terintegrasi (misalnya, bahasa, analogi, dan metafora) yang berperan sebagai panduan dalam preferensi strategis untuk mengatur urusan politik antar-negara (Johnston, 1995, p. 46). *'Cold peace'* menjadi budaya strategis yang dipilih Mesir dalam menyeimbangkan kepentingannya di Arab dan hubungan dengan Israel-Barat. *Cold peace* digambarkan sebagai hubungan negara-negara yang terbatas, cenderung diam, dan terkadang bermusuhan. Terdapat tiga hambatan yang menghasilkan *cold peace* antara Mesir dan Israel diutarakan oleh Podeh (2017, p. 108), antara lain:

1. Perjanjian perdamaian bilateral dengan Israel yang berbenturan dengan sifat dari sistem regional Arab di mana peran Mesir sangat signifikan di kawasan tersebut;
2. Selisih perspektif ideologis antara Mesir dan Israel terkait identitas masing-masing negara;
3. Persepsi negatif melalui informasi-informasi yang diciptakan oleh media, sistem pendidikan, literatur, seni, dan historiografi yang telah ada sejak konflik berkepanjangan terjadi antara Mesir dan Israel.

Hambatan pertama berhubungan dengan status Mesir sebagai negara Arab yang membatasi kemampuan manuvernya untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan tertentu dalam hal mempererat hubungan dengan Israel secara gamblang. Dengan kata lain, Mesir harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan kontra yang dapat menguatkan kepentingannya sebagai negara Arab di kawasan MENA, khususnya terkait isu Palestina sebagai fokus dari politik Arab secara umum. Hambatan selanjutnya adalah persoalan identitas, di mana Mesir dengan identitas Arab dan Islam, serta Israel

dengan identitas Yahudi dan Zionis. Ideologi Arabisme dan Islam Mesir memandang Palestina sebagai negara Arab dan *'sacred Muslim land'* yang patut diperjuangkan kebebasannya. Perbedaan identitas ini yang turut melatarbelakangi budaya strategis Mesir dalam menentukan sikap terhadap Israel. Kemudian hambatan berikutnya berkenaan dengan persepsi negatif yang disebarkan melalui informasi dari media. Saat kesepakatan suplai gas alam ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 2005, media pemerintah Mesir tidak menunjukkan ketertarikan terkait hal itu. Selanjutnya dilansir dari *New York Times* (2005), surat kabar utama milik pemerintah bahkan tidak menyebutkan penandatanganan kesepakatan suplai gas alam untuk menjauhkan publik dari informasi yang dinilai tidak baik. Hal itu diyakini dilakukan untuk mencegah protes publik.

Budaya strategis *cold peace* menciptakan hubungan antagonistik antara Mesir dan Israel. *Cold peace* menjadi pola yang menggambarkan hubungan keduanya, di mana masalah mendasar belum kunjung terselesaikan, tetapi diplomasi harus terus berjalan karena diikat oleh Perjanjian *Camp David* 1978 dan Perjanjian Perdamaian 1979.

### **Peran Institusi Domestik: Ambisi Ikhwanul Muslimin**

Realisme Neoklasik memandang bahwa fenomena dalam tingkat unit mencerminkan proses tawar-menawar antara institusi-institusi domestik sebagai aktor dalam masyarakat dan penguasa politik. Pengaturan kelembagaan pada institusi domestik mempengaruhi kemampuan pengambil kebijakan pusat untuk mengekstrak atau memobilisasi sumber daya dari masyarakat domestik (Taliaferro, 2006, p. 487). Salah satu institusi domestik yang sangat berperan dalam pembatalan perjanjian suplai gas alam tahun 2012 adalah Ikhwanul Muslimin (IM) atau *Muslim Brotherhood* di Mesir.

Sebagai salah satu gerakan Islam tertua dan paling berpengaruh di Mesir, IM merupakan kelompok yang memiliki andil yang besar dalam kebijakan luar negeri Mesir, terutama di bawah pemerintahan militer SCAF. Sebelum pemilihan parlemen tahun 2011 dilakukan, IM telah memobilisasi massa untuk melakukan demonstrasi dalam merespon kebijakan SCAF yang dinilai mengganggu penunjukkan anggota majelis konstitusi, di mana itu hanya dapat dilakukan oleh parlemen menurut konstitusi (Sharp, 2012, p. 1). Langkah SCAF tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap kekuatan IM itu sendiri. Namun dengan adanya keberhasilan IM dalam mendominasi parlemen melalui Partai *Freedom and Justice* (FJP), hal tersebut berimbas pada ambisinya untuk kemudian mendekati diri dengan pemerintah SCAF untuk dapat terus berada dalam percaturan politik domestik Mesir setelah dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintahan Mubarak.

IM dan SCAF kerap kali bernegosiasi untuk mendiskusikan transisi Mesir ke pemerintahan sipil yang akan dilakukan pada tahun 2012. Alhasil, IM berpihak pada pemerintah militer sebagai bagian dari pengaturan *power-sharing* yang dinilai akan berguna dan menguntungkan kedua belah pihak di kemudian hari saat pemimpin baru Mesir terpilih secara demokratis. Aliansi antara keduanya terlihat sangat jelas saat protes revolusioner terhadap SCAF oleh rakyat Mesir di mana Ikhwanul Muslimin memboikot protes, termasuk juga mengancam publik yang menuntut SCAF atas kekerasan yang dilakukan. IM terlihat melindungi SCAF dari tuntutan publik dengan narasi bahwa tuntutan melawan SCAF bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Dengan memanfaatkan mayoritas parlemen, mereka melindungi SCAF dari pertanggungjawaban hukum. Hubungan dekat IM dengan SCAF ini kemudian turut

mempengaruhi kebijakan luar negeri Mesir terhadap Israel pada masa transisi.

Dalam konteks hubungan dengan Israel, IM selalu menolak gagasan normalisasi hubungan dengan Israel. Hamas, sebagai afiliasi dari IM di Palestina, merupakan gerakan yang aktif melakukan konfrontasi dengan Israel dan berhasil memegang kekuasaan Palestina di Jalur Gaza sejak tahun 2007. Tak hanya pada isu Palestina, IM juga aktif mengomentari berbagai isu yang menyangkut keterlibatan Israel dan Barat dalam urusan negara-negara Arab di kawasan. Mereka menganggap Israel dan Barat adalah '*alliance of plotters*' melawan bangsa-bangsa Islam di Arab.

Dalam pernyataan yang dipublikasi melalui laman resmi IM pada Mei 2011, Dr. Mohamed Badie selaku Pimpinan Ikhwanul Muslimin mengungkapkan bahwa pemerintah baru Mesir harus meninjau kembali kesepakatan *Camp David* dan menuntut untuk mengakhiri normalisasi dengan Israel (IkhwanWeb, 2011). Lebih lanjut dalam laman resmi IkhwanWeb (2011), Badie menyerukan secara spesifik pembatalan ekspor gas alam ke Israel untuk menyambut 'era baru' Palestina se usai Mubarak lengser. IM juga melanggengkan ancaman pengusiran perwakilan pemerintah Israel di Mesir hingga Maret 2012 (Sharp, 2012, p. 12). Parlemen Mesir mengeluarkan *vote* untuk mengakhiri bantuan luar negeri AS, seperti mengusir Duta Besar Israel dari Mesir, dan menghentikan pengiriman pasokan gas alam ke Israel untuk merespon perang yang terjadi di Jalur Gaza antara militan Israel dan Palestina. Penghentian pasokan gas alam secara sepihak oleh Mesir pada April 2012 tidak lepas dari peran IM dalam parlemen. Aliansi IM dan SCAF telah mengantarnya pada perwujudan dari ambisi untuk mendominasi parlemen dan mengajukan calon presiden sipil di kalangannya pada pemilu demokratis pertama Mesir, yaitu Muhammad Mursi.

## Hubungan Negara dan Publik Mesir: Sentimen Anti-Israel/Anti-Amerika dan Ketersediaan Gas Alam

Berdasarkan pandangan Realisme Neoklasik, reaksi dan opini publik terhadap kebijakan yang diadopsi oleh negara dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut. Dalam kasus ini, signifikansi peran opini publik ini cukup besar dalam membantu pemerintah Mesir untuk mengambil keputusan. Misalnya, demonstrasi oleh rakyat Mesir pada akhir tahun 1970-an yang mempengaruhi keputusan Presiden Anwar Sadat untuk mengunjungi Yerusalem dalam upaya mendiskusikan perjanjian perdamaian. Keputusan pemerintahan Tantawi di bawah naungan SCAF turut dapat dianalisis melalui faktor domestik berupa reaksi dan opini publik terkait normalisasi hubungan Mesir dan Israel, serta ketersediaan gas alam yang semakin langka di Mesir.

Kekuatan publik Mesir merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam politik domestik dan internasional Mesir. Gelombang protes pada Revolusi Mesir tahun 2011 yang berhasil menjatuhkan Presiden Mubarak merupakan satu dari sekian banyak fenomena *people power* yang berhasil di Mesir. Saat demonstrasi besar-besaran berlangsung di Kairo, gerakan anti-Mubarak yang berfokus pada isu domestik diikuti oleh gerakan anti-Israel dan anti-Amerika. Isu Palestina merupakan salah satu topik panas yang menjadi bergema saat protes revolusi. Masalah Israel dan Palestina ini telah terinternalisasi di dalam kegelisahan publik Mesir dan menjadi perhatian bagi keamanan nasional Mesir (Abou-El-Fadl, 2012, p. 7).

Revolusi tahun 2011 menunjukkan puncak dari kesadaran publik Mesir terkait masalah kebijakan luar negeri negaranya. Narasi anti-normalisasi yang berkembang dalam publik Mesir mengangkat gagasan pembatalan perjanjian perdamaian Camp David. Secara

spesifik, Abou-El-Fadl (2012, p. 13) membeberkan perjanjian gas alam Mesir ke Israel yang disetujui sejak tahun 2005 juga menjadi bahan sindiran warga bagi pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan Mubarak saat demonstrasi tahun 2011 berlangsung. Israel pun turut menjadi substansi protes rakyat, terlihat dari poster Mubarak yang dihiasi dengan simbol Bintang David (Israel) dan spanduk dalam bahasa Ibrani yang memintanya turun dari kursi kepresidenan. Narasi anti-Israel dan anti-Amerika yang disuarakan saat demonstrasi menunjukkan bahwa rakyat Mesir tidak hanya menyoroti pembebasan Palestina, tetapi juga penolakan rakyat Mesir atas normalisasi dengan Israel dan campur tangan AS dalam politik domestik Mesir.

Warga Mesir menghubungkan kemiskinan mereka di tengah krisis ekonomi dengan kepatuhan Mubarak terhadap arahan AS dan hubungan baik dengan Israel demi keuntungan pribadinya (Abou-El-Fadl, 2012, p. 13). Kaitan tersebut dibuat lebih eksplisit melalui nyanyian yang mencela kenaikan harga pangan, upah yang kecil, dan campur tangan asing di bawah Mubarak. Di bawah pemerintahan SCAF, tingkat pengangguran mengalami kenaikan mencapai 12,6 persen pada kuartal pertama tahun 2012 (*Ministry of Finance*, 2012).

Rakyat Mesir terbilang aktif dalam mengeluarkan pendapatnya terkait hubungan Mesir dengan Israel dan AS. Survei pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 90 persen warga Mesir menganggap Israel sebagai ancaman terbesar Mesir (Khani, 2013, p. 113). *Pew Research* juga mengeluarkan survei terkait pandangan rakyat Mesir terhadap AS, seperti yang terlihat pada Tabel 3. Hasil survei tersebut menunjukkan 20 persen orang Mesir memandang baik AS dan 79 persen menilai sebaliknya.

**Tabel 3. Pendapat Rakyat Mesir terhadap AS**

Opinion of the U.S.	2010 (%)	2011 (%)
---------------------	----------	----------

Favorable	17	20
Unfavorable	82	79
Don't know	1	1

Sumber: *Pew Research Center* (2011)

Bersamaan dengan itu, lembaga survei yang sama juga mengadakan survei pada tahun 2012 terhadap publik Mesir terkait bantuan luar negeri AS yang selama ini diterima oleh Mesir sebesar USD1,3 miliar. Sebesar 61 persen berpendapat bahwa bantuan militer AS memiliki pengaruh berbahaya di Mesir, sementara hanya 11 persen percaya bahwa dampak positifnya, serta 25 persen mengatakan tidak membawa pengaruh apapun. Demikian pula dengan bantuan ekonomi AS kepada Mesir.

Tuntutan rakyat Mesir untuk membatalkan semua perjanjian dan hubungan komersial dengan Israel tercermin dalam berbagai demonstrasi dan hasil survei. Kesepakatan gas alam dengan Israel pun turut digugat oleh sekelompok masyarakat atas dugaan penjualan gas di bawah harga pasar global. Namun, EMG sebagai perusahaan pengeksport gas milik negara Mesir tidak menanggapi dan pemerintah Mesir juga tidak menyerahkan nota kesepakatan gas ke parlemen. Diketahui kerja sama gas dengan Israel ini tidak disukai oleh penduduk Badui di Sinai, di mana mereka beranggapan bahwa gas alam tersebut adalah sumber daya yang hanya menguntungkan pemerintah dan meminggirkan masyarakat setempat (Gold dalam Das, 2020, p. 5). Rakyat Mesir juga berpikiran bahwa kesepakatan gas dengan Israel tidak menghormati warga Palestina di perbatasan Gaza. Selanjutnya, kelompok masyarakat di Sinai memandang gas Mesir sebagai sumber daya Arab yang seharusnya tidak dijual kepada *'the Zionist occupier'*.

Selain alasan-alasan yang telah dijabarkan, rakyat Mesir melancarkan protes terhadap pemerintah karena mereka sadar akan kurangnya ketersediaan energi untuk

memenuhi kebutuhan domestik di Mesir. Rakyat mengomentari tentang pemadaman listrik yang sering terjadi sepanjang tahun 2011 dan 2012. Kementerian Listrik dan Energi Mesir dalam Korosec (2012) melaporkan bahwa sebesar 90 persen dari kapasitas pembangkit listrik negara adalah termal yang berasal dari turbin gas alam. Jadi apabila terjadi kekurangan ketersediaan gas alam, maka pemadaman listrik akan terjadi secara berkepanjangan.

Isu-isu tersebut menunjukkan retorika anti-Israel dan anti-Amerika berkembang luas di Mesir. Protes di luar Kedutaan Besar Israel dan Amerika Serikat di Kairo, diiringi dengan pembakaran bendera kedua negara tersebut telah menjadi agenda reguler bagi para demonstran. Pemerintah militer yang ingin memperoleh legitimasi rakyat Mesir pun mengambil langkah untuk membatalkan suplai gas alam sebelum masa akhir kontrak yang diputuskan tanpa negosiasi terlebih dahulu dengan pemerintah Israel, mengingat protes dan demonstrasi terus menerus dilakukan terhadap SCAF atas pemerintahan represif dan krisis ekonomi yang melejit.

## PENUTUP

Di balik kebijakan luar negeri suatu negara terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Melalui Realisme Neoklasik, peneliti menemukan faktor sistemik berupa Arabisme dan ancaman posisi Israel sebagai *gas-hub* di kawasan. Insentif sistemik tersebut diterjemahkan melalui tingkat unit dengan intervensi faktor domestik, yakni persepsi militer Mesir terhadap Israel, budaya strategis *'cold peace'*, peran Ikhwanul Muslimin, dan sentimen anti-Israel/anti-Amerika serta ketersediaan gas alam – mempengaruhi keputusan Mesir untuk menghentikan suplai gas alam ke Israel.

Melalui penelitian ini, peneliti menilai bahwa negara sekiranya menegosiasikan kerja sama manakala merasa dirugikan, sebab mengakhiri

kesepakatan secara unilateral dapat memicu perselisihan. Selain itu, batasan penelitian ini dari tahun 2008 saat Mubarak menjabat hingga 2012 saat SCAF memerintah. Sekiranya, penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih jauh sebelum dan setelah kesepakatan gas dengan Israel agar dapat mengonfirmasi pola hubungan kedua negara dengan lebih baik dan dapat melengkapi kekurangan oleh karena keterbatasan informasi resmi pemerintah yang bukan berbahasa Arab.

## Daftar Pustaka

- Abou-El-Fadl, R. (2012). The Road to Jerusalem through Tahrir Square: Anti-Zionism and Palestine in the 2011 Egyptian Revolution. *Journal of Palestine Studies*, Vol. 41 No. 2, hal. 6-26.
- Aljazeera. (2020). *Obituary: Hosni Mubarak, Egypt's longest-serving president*. Tersedia di: <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/25/obituary-hosni-mubarakegypt-longest-serving-president>.
- Alterman, J. B. (2005). Dynamics Without Drama: New Options and Old Compromises in Egypt's Foreign Policy. *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 18 No. 3, hal. 357-369.
- BBC. (2012). *Egypt presidential election: Decision on date delayed*. Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east17089433>.
- Black, I. (2009, January 15). Gaza split prompts Arab countries to boycott emergency summit. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2009/jan/15/gaza-egypt-saudi-qatar-summit>.
- Das, H. (2020). Israel's Gas Diplomacy with Egypt. *Contemporary Review of the Middle East*, Vol. 7 No. 2.
- Fahmy, M. F. (2011). *Israel gas deal sparks attacks in Egypt*. Tersedia di: <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/05/14/egypt.israel.al.Sabil.gas/index.html>.
- Forbes. (2020). *Will Natural Gas Isolate Turkey And Integrate Israel In The Eastern Mediterranean?*. Tersedia di: <https://www.forbes.com/sites/danielmarkind/2020/10/22/will-natural-gas-isolate-turkey-and-integrate-israel-in-the-eastern-mediterranean/?sh=76bfc2407209>.
- Gienger, V. (2011). *Three Decades With Egypt's Military Keep US in Loop*. Tersedia di: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2011-02-02/three-decades-of-missions-weapons-training-for-egypt-keep-u-s-in-loop>.
- IkhwanWeb. (2011, May 6). MB Chairman: Palestine and the New Era. Tersedia di: <https://www.ikhwanweb.com/article.php?id=28515&ref=search.php>.
- International Crisis Group. (2012). *Lost in Transition: The World According to Egypt's SCAF*. North Africa Report, No 121.
- Johnston, A. I. (1995). Thinking about Strategic Culture. *International Security*, Vol. 19 No. 4, hal. 32-64.
- Khani, A. B. (2013). Egyptian-Israeli Relations, History, Progress, Challenges and Prospects in the Middle East. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, Vol. 7 No. 3, hal. 93-120.
- Khatib, H. (2014). Oil and natural gas prospects: Middle East and North Africa. *Energy Policy*, Vol. 64, hal. 71-77.
- Korany, B. (1984). Foreign Policy in the Third World: An Introduction. *International Political Science Review*, Vol. 5 No. 1, hal. 7-20.
- Korany, B., Dessouki, A. E. H. (2008). Introduction: Foreign Policies of Arab States. Dalam B. Korany & A. E. H. Dessouki (Ed.). *The Foreign Policies of Arab States: The Challenge of Globalization* (hal. 1-8). Cairo: The American University Cairo Press.
- Korosec, K. (2012). *The energy subsidy-blackout link in Egypt*. Tersedia di: <https://www.zdnet.com/article/the-energy-subsidy-blackout-link-in-egypt/>.
- Lobell, S. E. (2009). Threat assessment, the state, and foreign policy: a neoclassical realist model. Dalam S. E. Lobell, N. M. Ripsman, J. W. Taliaferro (Ed.). *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*, hal. 42-74. New York: Cambridge University Press.
- LYNX. (2019). *Egypt: An Emerging Gas Hub*. Cairo: LYNX Strategic Business Advisors.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* [3rd Ed.]. Los Angeles: SAGE Publications.
- Milner, H. (1992). International theories of cooperation among nations: Strengths and

- weaknesses. *World politics*, Vol. 44 No. 3, hal. 466-496.
- Ministry of Finance. (2012). *The Financial Monthly June 2012*. Cairo: Egyptian Ministry of Finance.
- New York Times. (2005). *Egypt and Israel sign 15-year natural gas deal*. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2005/07/01/business/worldbusiness/egypt-andisrael-sign-15year-natural-gas-deal.html>.
- Pew Research. (2011). *Egyptians Embrace Revolt Leaders, Religious Parties and Military, As Well*. Tersedia di: <https://www.pewresearch.org/global/2011/04/25/egyptians-embracerevolt-leaders-religious-parties-and-military-as-well/>.
- Podeh, E. (2007). Normal Relations without Normalization: The Evolution of Egyptian-Israeli Relations, 1979-2006 - the Politics of Cold Peace. Dalam E. G. Corr, J. Ginat, S. M. Gabbay (Ed.). *The Search for Israeli-Arab Peace: Learning from the Past and Building Trust* (hal. 107-129). Brighton: Sussex Academic Press.
- Prontera, A., Ruszel, M. (2017). *Energy Security in the Eastern Mediterranean*. Middle East Policy, Vol. 24 No. 3, hal. 145-162.
- Ratner, M. (2016). *Natural Gas Discoveries in the Eastern Mediterranean*. Congressional Research Service.
- Ratner, M., et al. (2013). *Europe's Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification*. Congressional Research Service.
- Reis, D. (2014). *Israeli-Egyptian Gas Diplomacy: Cooperation, Rejection and Possible Reversal*. University of Haifa.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, Vol. 51 No. 1, hal. 144-172.
- Shaffer, B. (2013). Natural gas supply stability and foreign policy. *Energy Policy*, Vol. 56, hal. 114-125.
- Shama, N. M. (2008). *The Foreign Policy of Egypt Under Mubarak: The Primacy of Regime Security* (Doctoral Dissertation). Tersedia di: <http://hdl.handle.net/10023/569>.
- Sharp, J. M. (2011). *Egypt: The January 25 Revolution and Implications for U.S. Foreign Policy* [Report]. Congressional Research Service.
- Sharp, J. M. (2012). *Egypt in Transition*. Congressional Research Service.
- Sharp, J. M. (2012). *Egypt: Transition under Military Rule*. Congressional Research Service.
- Tahir Institute for Middle East Policy. (n.d.). *Hussein Tantawi*. Tersedia di: <https://timep.org/esw/stateactors/hussein-tantawi/>.
- Taliaferro, J. W., Lobell, S. E., & Ripsman, N. M. (2009). Introduction: Neoclassical realism, the state, and foreign policy. Dalam S. E. Lobell, N. M. Ripsman, J. W. Taliaferro (Ed.). *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy* (hal. 1-41). New York: Cambridge University Press.
- The Guardian. (2011). *Use your loaf: why food prices were crucial in the Arab spring*. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/jul/17/bread-food-arab-spring>.
- U.S. Congress. (2002). *Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act*. U.S. Government Information.
- Umar, M. I. A. (2013). *Egypt, Syria, and the War on Gaza*. Beirut: Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations.
- Wafa. (2008). *Arab Countries Send Medical Aid to Gaza*. Tersedia di: <http://english.wafa.ps/?action=detail&id=12465>.
- Wu, F. (2015). China's Puzzling Energy Diplomacy Toward Iran. *Asian Perspective*, Vol. 39 No. 1, hal. 47-69.
- Zanotti, J., et al. (2009). *Israel and Hamas: Conflict in Gaza (2008-2009)*. Congressional Research Service.